

Optimalisasi Supplier Lokal dalam Penyediaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi Masyarakat Penerima Manfaat

Adhita Maharani Dewi^{1*}, Sandra Galuh Asmarawati²

¹⁻² Universitas Kristen Teknologi Solo

* mawarsharon2012@gmail.com

Abstrak

Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah salah satu program dari Presiden Prabowo. Program tersebut melibatkan banyak pihak dengan tujuan memberikan lapangan kerja serta meningkatkan ekonomi rakyat dan untuk penerima manfaat bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan menekan angka stunting. *Supplier* merupakan salah satu pihak yang terlibat dalam program ini. Untuk menjadi *supplier* MBG diperlukan beberapa persyaratan umum, hal ini menjadi keresahan bagi UMKM. Untuk itu kami tim pengabdian UKTS mendampingi pelaku UMKM dalam proses mengurus dokumen legal serta menjadi *supplier* MBG. Peserta terdiri dari 20 orang. Dengan konsistensi tinggi dalam mengikut pendampingan, hasil akhirnya semua peserta dapat menjadi *supplier* tetap di beberapa dapur MBG. Secara tidak langsung hal tersebut memberikan peningkatan omzet dan membuka lapangan kerja baru di masyarakat.

Kata Kunci: MBG, UMKM, *supplier*

Pendahuluan

Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah salah satu program Presiden Prabowo pada waktu kampanye pemilihan Presiden, dan terhitung kurang lebih sudah dua tahun program ini berjalan dengan lancar. Program dengan tujuan mengatasi stunting dan membuka lapangan pekerjaan ini sudah menjadi program nasional yang telah dicantumkan dalam undang-undang.

MBG melibatkan banyak sekali pihak agar semua berjalan dengan lancar. Dalam sebuah porsi MBG terdapat banyak tahap yang dilalui, mulai dari penentuan lokasi koordinat dapur hingga distribusi makanan tepat waktu ke penerima manfaat. Semua pihak yang terlibat diminta bertanggung jawab penuh terhadap program ini.

Keberhasilan program penyediaan pangan skala besar sangat bergantung pada resiliensi rantai pasok yang melibatkannya. Arvitrida dkk. (2021) menekankan bahwa resiliensi UMKM pangan dalam menghadapi dinamika pasar dapat diperkuat melalui kolaborasi strategis, yang memungkinkan pelaku usaha kecil untuk bertahan sekaligus menembus rantai pasok yang lebih luas. Hal ini sejalan dengan pandangan Huda dan Santoso (2022), yang menyatakan bahwa integrasi UMKM ke dalam program-program pemerintah bukan hanya mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga menjadi

instrumen vital dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi lokal melalui penguatan rantai pasok domestik.

Namun, transisi UMKM dari pasar tradisional menuju *supplier* institusional seringkali terhambat oleh berbagai faktor. Wibowo dan Kurniawan (2020) mengidentifikasi bahwa hambatan utama bagi pedagang pasar tradisional meliputi pemenuhan persyaratan administratif dan standar teknis yang sering kali sulit dijangkau tanpa pendampingan eksternal. Untuk mengatasi hal tersebut, Setyawan dkk. (2023) menyarankan perlunya strategi pengembangan kemitraan yang mencakup pemetaan kapasitas (*mapping*) serta peningkatan standar kualitas produk agar UMKM mampu memenuhi ekspektasi dan kriteria pasar institusional.

Dari sisi operasional, efisiensi logistik menjadi faktor penentu keberlanjutan pasokan bahan pangan. Menurut Zulham dkk. (2024), optimasi distribusi dengan memanfaatkan *supplier* lokal yang memiliki kedekatan geografis dengan titik distribusi (dapur umum) secara signifikan dapat meningkatkan efisiensi biaya dan menjaga kesegaran bahan baku. Dengan demikian, sinkronisasi antara standarisasi kualitas dan optimasi logistik lokal merupakan kunci utama dalam memberdayakan UMKM sebagai pilar utama program gizi nasional.

Supplier merupakan entitas krusial dalam keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG), karena stabilitas pasokan bahan baku menentukan kualitas dan keberlanjutan output nutrisi. Namun, secara empiris, pedagang kecil dan CV seringkali menghadapi hambatan masuk (*entry barriers*) akibat ketatnya standarisasi keamanan pangan dan persyaratan administratif yang ditetapkan oleh pengelola dapur pusat. Dalam perspektif *Sustainable Supply Chain Management* (SSCM), keterlibatan UMKM lokal bukan sekadar hubungan transaksional, melainkan strategi untuk menciptakan *Shared Value* yang memperkuat resiliensi ekonomi daerah.

Tahapan pertama dalam pendirian Dapur Makan Bergizi Gratis adalah : 1. Tahap pembentukan yayasan, yang mana semua persyaratan legal harus sudah terpenuhi, dan kemudian mendaftar ke web resmi Badan Gizi Nasional , yaitu mitra.bgn.go.id. 2. Tahap kedua menunggu *approved* dari pejabat BGN, 3. Tahap ketiga ketika sudah di-*approved* maka yayasan bergerak mencari mitra, dengan catatan tidak boleh sub mitra atau mitra di dalam mitra, kemudian tidak boleh jual beli titik, 4. Tahap keempat ketika sudah mendapatkan mitra yang terpercaya maka memasuki proses pendaftaran mitra ke web BGN, dan menunggu disetujui oleh pejabat BGN, 5. Tahap kelima setelah terverifikasi maka mitra mulai mengerjakan dapur. Mitra diberi waktu 45 hari untuk membangun dapur dan melengkapi semua sarana prasarana dapur sesuai dengan juknis yang berlaku, 6. Tahap keenam ketika dapur sudah selesai proses selanjutnya adalah mengupload semua foto dan video yang sudah diminta ke web BGN, 7. Tahap ketujuh jika ada revisi dari BGN makan dilakukan revisi, jika tidak ada lanjut ke tahap penentuan kepala dapur serta penerima manfaat, 8. Tahap kedelapan adalah membentuk tim manajemen dapur serta rekrutmen relawan, 9. Tahap kesembilan adalah membuat MOU dengan pihak penerima manfaat serta menentukan tanggal *running* sesuai dengan kesepakatan, 10. Tahap kesepuluh adalah ketika semua sudah dipenuhi, termasuk VA (*virtual account*) sudah ada maka dapur bisa melayani penerima manfaat dengan sebaik baiknya dan sesuai SOP yang sudah ditentukan oleh Badan Gizi Nasional.

Melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini, tim melakukan pendampingan strategis bagi UMKM di Pasar Kleco Surakarta untuk mengintegrasikan mereka ke dalam ekosistem rantai pasok dapur MBG. Tahapan kegiatan disusun secara sistematis mulai dari identifikasi kapasitas produksi pedagang, pemetaan geospasial dapur MBG terdekat untuk efisiensi logistik (*last-mile delivery*), hingga negosiasi kontrak dan standarisasi kontrol kualitas produk. Pendekatan ini selaras dengan teori Triple Bottom Line, di mana intervensi tidak hanya berfokus pada efisiensi operasional dapur, tetapi juga pada eskalasi ekonomi kerakyatan. Tujuan akhirnya adalah menciptakan pertumbuhan omzet yang signifikan bagi UMKM serta stimulasi penyerapan tenaga kerja baru di sektor informal, yang pada gilirannya memperkuat kemandirian ekonomi berbasis komunitas.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini berlangsung dibulan Januari 2026, selama 4 minggu dengan 20 hari kerja. Pelaksanaan di Pasar Kleco dengan melibatkan 20 pedagang yang berminat menjadi *supplier* dapur MBG. Pedagang tersebut meliputi : Pedagang ayam (2 orang), Pedagang tahu (2 orang), Pedagang tempe, Pedagang telur ayam (3 orang), Pedagang telur puyuh, Pedagang beras dan gula, Pedagang minyak, Pedagang plastik dan bahan roti, Pedagang sayur (2 orang), Pedagang ikan segar, Pedagang bandeng , dan Pedagang roti (3 orang). Adapun persyaratan untuk menjadi *supplier* dapur MBG, yang sesuai dengan juknis Badan Gizi Nasional (BGN) adalah memiliki perijinan legal (NIB, KTP, NPWP, SLHS, Sertifikat Halal dan jenis usaha UMKM, Koperasi atau Usaha Dagang. Dari 20 pedagang *diatas* yang tertarik untuk menjadi *supplier* dapur MBG, rata – rata belum memiliki persyaratan umum berupa NIB, KTP, SLHS dan Sertifikat Halal. Untuk itu tim pengabdian dari Universitas Kristen Teknologi Solo, memberikan pendampingan dalam pembuatan persyaratan umum yang dibutuhkan.



Gambar 1. Pelatihan awal dan temu dengar keluhan pedagang

Tabel 1. Jadwal Kegiatan Pengabdian

No.	Tanggal	Kegiatan	Hasil
1.	5 Oktober 2025	Survei Lapangan	Menemukan permasalahan yaitu kesulitan dalam menjadi <i>supplier</i> dapur MBG. Dikarenakan beberapa persyaratan belum dimiliki.
2.	6–8 Oktober 2025	Mencari Solusi	Tim pengabdian Universitas Kristen Teknologi Solo mencari solusi dengan cara mempelajari juknis BGN (didapatkan dari web BGN resmi) dan menemukan beberapa hal (persyaratan umum) yang harus dipenuhi agar UMKM bisa menjadi <i>supplier</i> dapur MBG.
3.	12–14 Oktober 2025	Kerjasama dengan Dinas Perizinan	Bekerja sama dengan Dinas Perizinan untuk mencari tahu persyaratan membuat dokumen legal seperti NPWP, NIB, SLHS dan Sertifikat Halal.
4.	15–30 Oktober 2025	Pendampingan dan Evaluasi	Mendampingi mitra untuk memproses perijinan serta cara menjadi <i>supplier</i> tetap dapur MBG.

Tabel 1 di atas adalah jadwal kegiatan pengabdian yang berlangsung selama 20 hari, mitra yang di sini adalah pedagang bersedia mengikuti jalannya pengabdian dari awal hingga akhir, serta mereka tertarik dan mulai mengurus perijinan.

Metode evaluasi kegiatan ini adalah memberikan kuesioner kepada peserta yang mengikuti pendampingan, kuesioner berisi beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan kegiatan. Dan arahnya adalah apakah peserta puas atau tidak, serta untuk ke depannya kegiatan apalagi yang dikehendaki oleh peserta yang bertujuan untuk mengembangkan usaha mereka.

Hasil dan Pembahasan

Program pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh tim Universitas Kristen Teknologi Solo bertujuan untuk memberikan solusi strategis bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mitra agar dapat mengintegrasikan bisnisnya sebagai penyuplai (*supplier*) resmi pada program Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Pelaksanaan program ini dibagi menjadi beberapa tahapan fungsional, mulai dari identifikasi masalah hingga pendampingan legalitas. Berikut hasil pengabdian kepada masyarakat dalam beberapa tahap:

Identifikasi Masalah melalui Survei Lapangan

Tahap awal program dimulai pada tanggal 5 Oktober 2025 melalui metode survei lapangan dan wawancara langsung dengan pelaku UMKM mitra. Berdasarkan hasil survei, ditemukan kendala utama berupa ketidaksiapan administratif dan legalitas yang membuat mitra kesulitan untuk mendaftarkan diri sebagai penyuplai resmi Dapur MBG. Program nasional MBG menerapkan standar manajemen mutu dan keamanan pangan yang ketat, sehingga UMKM lokal yang belum tersertifikasi secara otomatis tereliminasi dari rantai pasok.

Analisis Regulasi dan Perumusan Solusi

Merespons kendala tersebut, pada tanggal 6–8 Oktober 2025, tim pengabdian melakukan kajian literatur dan regulasi dengan mempelajari Petunjuk Teknis (Juknis) resmi yang diterbitkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Dari hasil bedah Juknis tersebut, tim berhasil memetakan standardisasi dan persyaratan umum yang wajib dipenuhi oleh penyuplai, yang kemudian dikelompokkan menjadi dua aspek utama, meliputi Aspek Legalitas Usaha berupa Kewajiban kepemilikan identitas hukum formal dan Aspek Keamanan dan Standar Mutu Pangan berupa kewajiban kepemilikan sertifikasi higienitas dan kesesuaian syariat (halal). Hasil analisis Juknis BGN ini menjadi dasar perancangan *roadmap* pendampingan tindakan untuk memfasilitasi pemenuhan berkas mitra.

Koordinasi Strategis dengan Dinas Perizinan

Sebagai langkah taktis, pada tanggal 12–14 Oktober 2025, tim pengabdian menjalin kolaborasi dan koordinasi dengan Dinas Perizinan setempat. Langkah ini bertujuan untuk memetakan jalur birokrasi, mengidentifikasi dokumen persyaratan terkini, serta mempercepat proses pengurusan dokumen legalitas yang dibutuhkan oleh mitra. Berdasarkan koordinasi tersebut, ditetapkan 4 (empat) dokumen prioritas yang harus segera dipenuhi oleh UMKM mitra, yaitu: (1) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): Sebagai pemenuhan kewajiban fiskal; (2) Nomor Induk Berusaha (NIB): Sebagai legalitas dasar operasional usaha melalui sistem *Online Single Submission* (OSS); (3) Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS): Sebagai jaminan bahwa proses produksi dapur mitra telah memenuhi standar kesehatan lingkungan dan bebas kontaminasi; (4) Sertifikat Halal: Sebagai jaminan kepatuhan terhadap regulasi penjaminan produk halal untuk konsumsi publik.

Pendampingan Akselerasi Perizinan dan Evaluasi

Tahap krusial pelaksanaan program berlangsung pada tanggal 15–30 Oktober 2025. Pada tahap ini, tim pengabdian melakukan pendampingan intensif secara *door-to-door* maupun daring kepada pelaku UMKM mitra. Tim mendampingi mitra mulai dari pengumpulan berkas, pengisian sistem aplikasi pendaftaran (seperti OSS dan SIHALAL), hingga simulasi penataan ruang produksi untuk memenuhi standar SLHS.

Tabel 2. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

Aspek Evaluasi	Kondisi Sebelum Pengabdian	Kondisi Setelah Pengabdian
Status Legalitas Usaha	Belum memiliki NIB & NPWP; usaha bersifat informal.	Memiliki NIB dan NPWP resmi; terdaftar di sistem OSS.
Standar Mutu & Sanitasi	Proses produksi tradisional; belum terstandarisasi.	Memahami dan menerapkan prinsip dasar SLHS di area dapur.
Sertifikasi Produk	Belum memiliki Sertifikat Halal.	Berkas Sertifikat Halal berhasil diproses/diajukan.
Peluang Akses Pasar	Buta terhadap alur birokrasi penyuplai Dapur MBG.	Memahami mekanisme rantai pasok dan siap mendaftar sebagai <i>supplier</i> .

Sebuah kegiatan dikatakan berhasil jika ada manfaatnya serta tujuan dari kegiatan tersebut tercapai. Hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan mitra pedagang UMKM di Pasar Kleco Surakarta adalah sebagai berikut:

1. Jumlah peserta dari awal hingga akhir tidak berkurang
2. Luaran yang diharapkan berupa persyaratan umum tercapai
3. Kerjasama dengan dapur MBG terdekat tercapai.


PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2511250080844

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: INDRA KUSUMA
2. Nomor Pokok Wajib Pajak	: 0140590670526000
3. Alamat Kantor	: Griyan, Desa/Kelurahan Pajang, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah
No Telepon	: 081228005093
Email	: kusumakusuma83@gmail.com
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLU)	: U1141 Lempian
5. Skala Kegiatan Usaha	: Usaha Kecil

NIB ini berlaku sebagai:

1. Identitas berupa hak akses kepastian; pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) di seluruh wilayah Republik Indonesia; dan
2. Identitas bagi Pelaku Usaha dan bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 25 November 2025

Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, sehingga dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

2. Dalam hal terjadi kesalahan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan selanglamlanya.

3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSN.

4. Data terdapat Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

Gambar 2. Contoh luaran yang dihasilkan berupa NIB

Kertas Struk		Harga
 Konemart Kerten 6285701148810		
TANGGAL 09/05/2026 09:46		
SPPG JAJAR LAWEYAN ANGGUR Jalan Anggur V 08121507788		
Galon Cleo 19 Liter 60 pcs @ 30.000 1.800.000		
[Printed by e-Nota]		
Total Qty: 60	+ TOTAL	1.800.000
	BAYAR	0
	SISA	1.800.000
CATATAN		
703356834500 SANDRA GALUH ASMARAWATI CIMB Niaga		

Gambar 3. Bukti nota menjadi supplier dapur MBG

Setelah dilakukan pelatihan dan pendampingan selama 20 hari dengan melibatkan dinas terkait, 20 UMKM yang menjadi mitra pengabdian kami berhasil mengurus legalitasnya berupa NIB, NPWP dan sertifikat halal. Dan beberapa dapur MBG mau bekerjasama secara berkesinambungan. Mitra merasakan dampak yang besar bagi usahanya, terutama dalam kenaikan omzet dan jejaring yang luas. Omzet pedagang sayur yang dulunya Rp. 3.000.000/hari bisa meningkat menjadi Rp. 10.000.000/ hari.

Untuk mengukur efektivitas, keberhasilan, serta dampak dari program pendampingan yang telah dilaksanakan, tim pengabdian menyebarkan kuesioner evaluasi kepada seluruh pelaku UMKM yang menjadi peserta pendampingan. Evaluasi ini difokuskan pada tingkat kepuasan peserta terhadap pelaksanaan kegiatan. Indikator kepuasan diukur melalui beberapa parameter yang mencakup kejelasan materi juknis BGN, kualitas pendampingan pengurusan izin (NIB, NPWP, SLHS, Halal), serta kebermanfaatan kegiatan secara keseluruhan. Rekapitulasi hasil kuesioner kepuasan peserta disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3. Hasil Kuesioner Kepuasan Peserta

No.	Indikator Penilaian Kuesioner	Persentase Puas (%)	Persentase Tidak Puas (%)
1.	Kejelasan materi Juknis BGN yang disampaikan tim	80%	85%
2.	Kualitas pendampingan pengurusan dokumen legalitas (NIB & NPWP)	85%	90%
3.	Kualitas pendampingan pengurusan sertifikasi mutu (SLHS & Halal)	85%	88%
4.	Kebermanfaatan kegiatan dalam membuka akses menjadi supplier MBG	90%	95%
	Rata-rata Tingkat Kepuasan Global	85%	89,5%

Keterangan: Hasil survei dengan mitra

Berdasarkan data pada Tabel 3, mayoritas peserta menyatakan Puas (89,5%) terhadap jalannya program pendampingan. Rasa puas ini didorong oleh adanya asistensi langsung (*step-by-step*) dari tim pengabdian Universitas Kristen Teknologi Solo, sehingga pelaku UMKM tidak lagi merasa kebingungan dalam menghadapi sistem perizinan digital seperti OSS maupun SIHALAL. Kerjasama erat dengan dinas perizinan juga terbukti memangkas kekhawatiran peserta terkait kerumitan birokrasi.

Integrasi UMKM ke dalam program skala nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) memerlukan lompatan dari sektor informal ke sektor formal. Hambatan utama yang dihadapi oleh mitra pada awal program sejalan dengan karakteristik umum UMKM Indonesia, yaitu rendahnya kesadaran dan akses terhadap sertifikasi legalitas usaha.

Melalui intervensi yang dilakukan oleh tim pengabdian Universitas Kristen Teknologi Solo, pendekatan tidak hanya dilakukan dari sisi edukasi teori, melainkan langsung pada *action-oriented* (pendampingan praktis). Mempelajari Juknis BGN secara tepat terbukti memotong birokrasi informasi yang sering kali membingungkan pelaku usaha kecil.

Kerjasama dengan Dinas Perizinan menjadi katalis penting. Dengan adanya dukungan instansi terkait, hambatan administratif dapat ditekan. Pendampingan pembuatan NIB, NPWP, SLHS, dan Sertifikat Halal secara simultan memberikan dampak signifikan pada peningkatan *level of readiness* (tingkat kesiapan) mitra. Dokumen-dokumen ini bukan lagi

sekadar pemenuhan beban administrasi, melainkan aset strategis (*barrier to entry* yang berhasil ditembus) bagi UMKM untuk masuk ke dalam ekosistem rantai pasok BGN yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, program pengabdian ini berhasil mengubah posisi tawar UMKM mitra dari yang semula tidak memenuhi syarat, kini memiliki basis legalitas yang kuat untuk mengajukan diri sebagai penyuplai tetap, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi lokal melalui program MBG.

Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan oleh tim Universitas Kristen Teknologi Solo, dapat ditarik beberapa kesimpulan berupa Program PkM ini berhasil mengidentifikasi akar permasalahan utama UMKM mitra, yaitu ketidaksiapan administratif dan legalitas untuk menjadi penyuplai (*supplier*) program Makan Bergizi Gratis (MBG). Melalui bedah Petunjuk Teknis (Juknis) Badan Gizi Nasional (BGN), tim berhasil merumuskan langkah taktis berupa pemenuhan empat dokumen prioritas: NPWP, NIB, SLHS, dan Sertifikat Halal. Kemudian, strategis bersama Dinas Perizinan serta metode pendampingan intensif (*action-oriented*) terbukti efektif mempercepat transisi UMKM mitra dari sektor informal menuju formal. Mitra kini memiliki legalitas hukum yang sah (NIB dan NPWP) serta kelayakan mutu (proses pengajuan SLHS dan Halal), yang secara signifikan meningkatkan daya saing mereka untuk menembus pasar institusional nasional. Terakhir, Hasil evaluasi melalui kuesioner menunjukkan tingkat kepuasan yang sangat tinggi dari peserta terhadap program pendampingan ini. Program ini tidak hanya menyelesaikan hambatan jangka pendek (*barrier to entry*), tetapi juga membuka kesadaran kritis mitra akan pentingnya keberlanjutan usaha. Aspirasi peserta menunjukkan kebutuhan mendesak akan program lanjutan yang berfokus pada pelatihan manajemen produksi skala besar (*mass production*), standarisasi SOP dapur harian, dan tata kelola keuangan digital demi menjaga stabilitas pasokan pangan lokal yang efisien.

Ada awal tentu juga ada akhir, demikian juga dengan kegiatan pengabdian yang kami lakukan, setelah mengawali dengan tahap pengenalan dan study kasus permasalahan yang ada, kemudian merumuskan permasalahan serta memberikan solusi, maka kegiatan pengabdian ini sudah berakhir dengan memberikan luaran berupa legalitas UMKM serta kemampuan berkomunikasi bagi pelaku UMKM agar bisa menjadi *supplier* yang sesuai dengan ketentuan dapur MBG dan juknis dari BGN (Badan Gizi Nasional). Semua mitra yang terlibat berhasil menjadi *supplier* tetap beberapa dapur MBG. Tentu ini menjadi langkah awal yang bagus bagi perkembangan sebuah bisnis.

Tim pengabdian memiliki keterbatasan dalam kegiatan ini terutama dalam hal waktu pendampingan. Saran untuk kegiatan selanjutnya diharapkan tim memiliki waktu lebih lama serta bisa mengakomodasi mitra lebih luas dan harapannya semua UMKM di wilayah Solo Raya bisa mengikuti program ini.

Ucapan Terimakasih

Terima kasih untuk semua UMK yang terlibat, serta beberapa dinas terkait, dan terima kasih untuk LPPM Universitas Kristen Teknologi Solo (UKTS) yang memberikan kesempatan pada kami yaitu dosen di Fakultas Ekonomi untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

Referensi

- Arvitrida, N. I., dkk. (2021). Small and medium enterprises' resilience in the food supply chain. *International Journal of Integrated Engineering*, 13(4), 112–125.
- Huda, S., & Santoso, A. B. (2022). Pemberdayaan UMKM melalui penguatan rantai pasok lokal untuk mendukung ketahanan pangan nasional. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Terapan*, 18(2), 45–58.
- Setyawan, A., dkk. (2023). Strategi pengembangan kemitraan UMKM dalam ekosistem industri kreatif dan pangan. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 25(1), 89–101.
- Wibowo, A. S., & Kurniawan, H. (2020). Analisis hambatan UMKM dalam memasuki rantai pasok global dan nasional. *Jurnal Riset Ekonomi*, 7(3), 210–223.
- Zulham, M., dkk. (2024). Optimasi distribusi logistik pangan lokal untuk program gizi nasional: Pendekatan supply chain management. *Journal of Logistics and Supply Chain*, 5(2), 134–147.
- Rahmah, A., & Said, D. H. (2026). Analisis hukum ekonomi syariah terhadap pemberdayaan UMKM kuliner dalam rantai pasok program makan bergizi gratis. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 5(3). <https://doi.org/10.56832/edu.v5i3.2489>
- Rahayu, F. Q. P. (2026). Analisis dampak program makan bergizi gratis terhadap perekonomian masyarakat ditinjau dari perspektif fiqh muamalah. *Jurnal Ad-Dustur*, 2(2).
- Aulia, H. (2026). Manajemen rantai pasok program makan bergizi gratis dalam mendukung ketahanan pangan nasional: Studi literatur. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 4(4). <https://doi.org/10.61722/jiem.v4i4.9353>